

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, GAYA
KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN *GOOD GOVERNMENT
GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kulon Progo)**

Oleh:

Weny Eka Listyowati

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Email:

weny_ekalistyowati@yahoo.com

ABSTRAC

This study aims to test and prove empirically the influence of budget arrangement participation, leadership style, organizational culture and good government governance on the performance of local government in SKPD of Kulon Progo Regency. Population in this study is all SKPD in Kulon Progo Regency amounting to 25 SKPD. The sampling technique in this research is done by purposive sampling with the existence of certain criterion applied. The sample in this study is a structural officer who occupy the position as head of section, head of field, head of sub section, head of sub field, head of division, and treasurer in SKPD Kulon Progo Regency. The type of the data used in this study are primary data. Data collection techniques using questionnaires were distributed directly to 184 respondents. The data collected were analyzed by testing the quality of instruments and the data is then testing hypothesis with SPSS for windows version 15.0. Based on the result of the analysis that has been done shows that the influence of budget arrangement participation, leadership style and good government governance has a positive and significant impact on the performance of local government. However, organizational culture has positive and insignificant impact on the performance of local government.

Keywords: Budgetary Participation, Leadership Style, Organizational Culture, Good Government Governance, and Local Government Performance.

I. PENDAHULUAN

Fenomena umum tentang otonomi daerah diartikan bahwa setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dalam mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan kebutuhannya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pengembangan otonomi pada daerah/kabupaten/kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menjelaskan bahwa satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Hal tersebutlah yang menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Hubungan yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat adalah saling percaya. Hal inilah yang sesuai dengan filosofi manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, bertindak penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran (Podrung, 2011). Tuntutan dari masyarakat lainnya yaitu

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dasar perwujudan penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik tertuang dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Sebagai salah satu organisasi sektor publik pemerintah daerah dituntut memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan kondisi lingkungan daerah yang sesungguhnya.

Penganggaran dalam organisasi sektor publik memiliki tahapan yang cukup rumit karena penganggaran dalam sektor publik terkait dengan jumlah alokasi dana untuk tiap program atau aktivitas dalam satuan moneter (Irianto, 2013). Agar realisasi anggaran sesuai tujuannya maka diperlukan kerjasama dan partisipasi yang baik antara lini bagian, atasan, dan bawahan dalam penyusunan anggaran. Peningkatan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh partisipasi penyusunan anggaran, semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Dewi dkk., 2015).

Keberhasilan mengelola organisasi pemerintahan tidak terlepas dari peran seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki sikap tegas dan mampu memberikan contoh pada bawahannya dalam melaksanakan tugas, maka tujuan dari organisasi tersebut akan tercapai. Faktor kepemimpinan menjadi

sangat penting karena dari peran pemimpin tersebut organisasi dapat menunjukkan karakter kinerjanya (Embrianto dkk., 2016). Maka dari itu seorang pemimpin harus mampu mengembangkan gaya kepemimpinannya yang mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerahnya.

Selain gaya kepemimpinan, keberhasilan suatu organisasi pemerintah juga tergantung pada budaya organisasi yang ada di dalamnya. Budaya organisasi yang berkualitas maka akan menciptakan iklim kerja yang baik. Aisyah dkk. (2014) berpendapat bahwa budaya organisasi dapat dijadikan acuan perilaku manusia dalam organisasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan atau hasil kinerja yang ditetapkan, sehingga jika budaya organisasi baik, maka tidak mengherankan jika anggota organisasi adalah orang-orang yang baik dan berkualitas pula.

Disamping itu, keberhasilan suatu organisasi khususnya pemerintahan tidak terlepas dari penerapan *good government governance*. Secara umum masyarakat di Indonesia menginginkan tata kelola negara dan keuangan dijalankan dengan baik, bersih, transparan dan bertanggung jawab. *Good governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi etika profesional dalam berusaha dan berkarya, selain itu *good governance* menerangkan perangkat peraturan yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan publik (Jatmiko dan Lestiawan, 2016).

Fenomena yang terjadi pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten

Kulon Progo gagal mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) 2016 sebesar Rp 220.379 miliar, realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo 2016 hanya mencapai Rp 180.273 miliar atau sebesar 81,80% dari yang ditargetkan sebesar Rp 220.379 miliar hal ini dikarenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pembebasan tanah bandara masuk pada tahun selanjutnya. (Progonews.com). Selain itu, terkait hasil pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2016 menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo baru sekali mendapatkan opini WTP dari BPK.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menguji kembali pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah daerah karena masih terdapat hasil penelitian yang belum konsisten yang dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya. Di samping itu juga untuk menguji apakah gaya kepemimpinan, dan *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah partisipasi penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan *good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship*

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori *stewardship*. (Donaldson dan Davis, 1991), menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Dengan kata lain, teori *stewardship* menjelaskan bahwa manajemen berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun *shareholders* pada khususnya (Daniri, 2005). Asumsinya adalah ketika terjadi perbedaan kepentingan antara *principles* dan *steward*, maka *steward* akan memberikan pertimbangan yang rasional yaitu dengan mengajak bekerjasama hal ini dikarenakan kepentingan bersama jauh lebih penting untuk organisasi daripada tujuan individu (Raharjo, 2007).

Anggaran

Anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu (Garrison dan Noreen, 2000). Menurut Mardiasmo (2009), anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang telah ditetapkan dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran sektor publik digunakan sebagai wadah untuk menampung aspirasi dari kelompok masyarakat,

dengan demikian akan tercipta ruang bagi partisipasi publik.

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Menurut Mulyadi (2001) partisipasi dalam penyusunan anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya atau penyusunan anggaran yang memungkinkan bawahan untuk bekerjasama menentukan rencana. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan keterlibatan menyampaikan pendapat dari bawahan kepada atasan dalam proses penyusunan anggaran (Hansen dan Mowen, 2004). Adanya proses partisipasi dalam penyusunan anggaran, pemerintah akan memperoleh informasi dari masyarakat yang disampaikan lebih akurat berupa informasi lokal yang berguna sebagai standar yang dapat memberikan keuntungan terhadap pengukuran kinerja.

Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah suatu cara dan proses kompleks dimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas atau suatu sasaran dan mengarahkan organisasi dengan cara yang lebih masuk akal (Wijana dan Supardo, 2006). Gaya kepemimpinan menurut Hasibuan (2007), dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Kepemimpinan Otoriter, Kepemimpinan Partisipatif, dan Kepemimpinan Delegatif.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai,

kepercayaan, dan kebiasaan dalam organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Menurut Robbins dan Judge (2017), budaya organisasi merupakan persepsi bersama atau suatu sistem dari makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya.

Good Government Governance

Good government governance merupakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dan pencegahan korupsi (Pratolo dan Jatmiko, 2017). Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelola, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintah (Aisyah dkk., 2014).

Kinerja Pemerintah

Istilah kinerja sering disebut dengan unjuk kerja. Kinerja atau *performance* yaitu hasil dari suatu proses pembentukan aktivitas. Menurut Bastian (2001), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Ramadanil (2013) menjelaskan bahwa terdapat empat elemen dalam kinerja yaitu:

- 1) Hasil kinerja yang dicapai secara individual atau institusi dengan hasil akhir secara individu maupun kelompok.

- 2) Dalam melaksanakan tugas, setiap orang atau lembaga diberi hak dan kekuasaan sehingga pekerjaannya dapat terselesaikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pekerjaan harus dilakukan secara legal.
- 4) Pekerjaan tidak bertentangan dengan etika dan norma.

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Kinerja Pemerintah Daerah

Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan salah satu pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya juga meningkatkan efektivitas organisasi (Embrianto dkk., 2016). Adanya partisipasi penyusunan anggaran diharapkan setiap individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Nazaruddin dan Setyawan, 2012). Aparat dari setiap instansi pemerintah daerah ikut dan diberi partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran kinerja mereka akan meningkat dan juga memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan anggaran tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan.

Hal ini didasarkan pada pemikiran ketika tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui atasan, maka karyawan akan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi, apabila aparat dari setiap instansi pemerintah daerah ikut dan diberi partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran, maka secara

signifikan kinerja aparat pemerintah daerah juga akan meningkat sesuai dengan target yang diberikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Rohman (2012) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yenti (2013) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Dari uraian di atas, diturunkan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁ : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja Pemerintah Daerah

Hidayat dkk. (2014), mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku seorang pemimpin yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara pimpinan dan bawahan untuk mempengaruhi bawahannya dalam bertindak agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Berbagai cara yang dialuknkan oleh pemimpin untuk menggerakkan bawahannya bertindak guna mencapai tujuan organisasi harus menimbulkan kinerja yang efektif, sehingga secara tidak langsung gaya kepemimpinan juga menentukan tercapainya tujuan organisasi. Jadi, semakin cakap gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam mempengaruhi kinerja aparat pemerintah yang ada di bawahnya, maka akan semakin baik pula kinerja

aparat pemerintah pada instansi tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Embrianto dkk. (2016) menyatakan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari uraian di atas, diturunkan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂ : Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

Hubungan Budaya Organisasi dengan Kinerja Pemerintah Daerah

Budaya organisasi adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara kerja dan perilaku para anggota organisasi (Amelia dkk., 2014). Budaya organisasi merupakan faktor yang paling kritis dalam organisasi. Budaya organisasi yang kuat mempunyai ciri khas khusus yang menjadi daya tarik tersendiri karena hal itu yang membekadakan dengan budaya di organisasi lainnya.

Manfaat pemahaman budaya organisasi bagi sumber daya manusia yaitu memberikan pedoman berperilaku dalam organisasi dan manfaat bagi organisasi yaitu menyamakan langkah dan visi dalam melaksanakan tanggung jawab menjalankan tugas. Jadi, semakin baik atau positif budaya organisasi dalam birokrasi maka semakin baik pula kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan dan kinerja pemerintah daerah akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dkk. (2014) menyatakan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja

pegawai. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dkk. (2014) menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari uraian di atas, diturunkan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃ : Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hubungan *Good Government Governance* dengan Kinerja Pemerintah Daerah

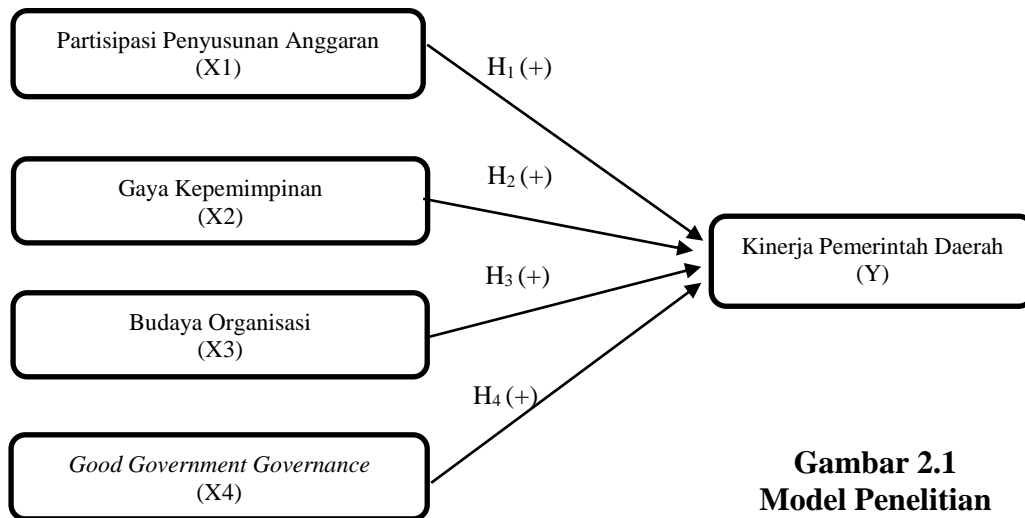
Good governance menerangkan perangkat peraturan yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan publik (Jatmiko dan Lestiawan, 2016). Azlina dan Amelia (2014), menyatakan bahwa pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akurat. Aparat pemerintah daerah yang memiliki pemahaman yang *good governance* secara benar maka mempengaruhi perilaku profesionalnya pada kinerjanya sehingga tujuan akhir yang diharapkan dapat tercapai.

Jadi, apabila aparat pemerintah daerah mempunyai pemahaman dan mampu menerapkan *good government governance* secara tepat dan benar, maka profesionalitas aparat pemerintah dengan orientasi kinerja yang tinggi untuk mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Azlina dan Amelia (2014) menyatakan *good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari uraian di atas, diturunkan hipotesis keempat sebagai berikut:

H₄ : *Good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

Subyek/Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah instansi pemerintah daerah yang berada di Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo. Subyek yang digunakan pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Dinas dan Badan Kabupaten Kulon Progo.

Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari SKPD Kabupaten Kulon Progo.

Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah 27 SKPD yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Sampel pada penelitian ini adalah pegawai/staf yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Dinas dan Badan Kabupaten Kulon Progo Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu:

1. Pegawai/staf di pemerintahan daerah Kabupaten Kulon Progo yang menduduki jabatan Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Bendahara dari Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
2. Menduduki jabatan tersebut minimal 2 tahun.
3. Telah menempuh pendidikan minimal D3.

Pada penelitian ini penentuan jumlah sampel menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot \alpha^2)}$$

Keterangan : n= jumlah sampel

N = jumlah populasi

α = nilai sig (5%)

Sehingga di dapatkan jumlah sampel sebanyak 25 SKPD, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{27}{1 + (27 \cdot 0,05^2)} = 25$$

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data yang diinginkan dari suatu penelitian. Sesuai dengan metode yang digunakan untuk memperoleh data maka penelitian ini menggunakan metode *survey* dengan menyebarkan kuesioner.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk uji validitas adalah *Pearson Corellation* yaitu dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan total skor. Suatu data dikatakan valid apabila $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$, maka data kuesioner dikatakan valid (Ghozali, 2011).

Untuk mengukur reliabilitas uji statistik yang digunakan adalah *Cronbach's Alpha* dengan taraf signifikan 5%. Variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,70$ (Nazaruddin dan Basuki, 2017).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov Sminirnov* dengan koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* $> \alpha 0,05$ yang berarti data berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

b. Uji Multikolinearitas

Suatu uji regresi dikatakan bebas multikolinieritas jika

memiliki nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$ (Ghozali, 2011).

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser* dengan meregresi uji absolut residual dengan variabel bebas yang digunakan. Jika nilai *Sig* $> \alpha 0,05$ maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (Nazaruddin dan Basuki, 2017).

Uji Hipotesis dan Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi mempelajari tata cara pengumpulan, pencatatan, penyusunan dan penyajian tata penelitian dalam bentuk tabel frekuensi atau grafik dan selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statistiknya seperti *mean* (rata-rata), median, modus, deviasi standar.

2. Uji Regresi Berganda

Secara umum formula regresi linier berganda untuk sampel dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Kinerja pemerintah daerah

α : Konstanta

$\beta_{1,2,3,4}$: Koefisien regresi

X₁ : Partisipasi penyusunan anggaran

X₂ : Gaya Kepemimpinan

- X_3 : Budaya Organisasi
 X_4 : *Good government governance*
 e : Standar error

3. Uji F

Pengujian nilai F merupakan pengujian variabel-variabel independen secara bersama-sama. Jika hasil analisis menunjukkan hasil nilai $sig F < \alpha$ 0,05 maka terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen.

4. Uji t

Pengujian nilai t merupakan pengujian variabel-variabel independen secara individu. Hipotesis diterima jika:

1. Jika nilai signifikansi (Sig) $< \alpha$ 0,05 artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen
2. Jika nilai signifikansi (Sig) $> \alpha$ 0,05 artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen
3. Koefisien regresi searah dengan hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Nilai *Adjusted R Square* menjelaskan besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah dalam bentuk presentase, setelah itu sisanya (100% - presentase koefisien determinasi) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

Penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 25 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peneliti menentukan dan mengambil sampel dengan menggunakan Rumus Slovin sehingga diperoleh hasil sebanyak 25 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kulon Progo yang meliputi Dinas, Badan, Sekda, dan Inspektorat. Pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 13 November s.d 30 November 2017.

Deskripsi Penelitian Berdasarkan Jabatan Kerja

Data penelitian ini menggunakan data primer yaitu data diperoleh dengan pembagian kuesioner kepada responden secara langsung. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive* sampling. Kuesioner ini ditujukan kepada pegawai yang menduduki jabatan sebagai kepala bagian, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala seksi, dan bendahara yang menduduki jabatan tersebut minimal dua tahun dengan tingkat pendidikan minimal D3. Kuesioner didistribusikan ke 25 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah menerima 4-10 kuesioner sehingga diperoleh responden sebanyak 184.

TABEL 4.1
Sampel dan Tingkat Pengembalian

Keterangan	Jumlah
Total penyebaran kuesioner	184
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	10
Jumlah kuesioner yang kembali	174
Jumlah kuesioner yang tidak diisi lengkap (cacat)	5
Total kuesioner yang diolah	169
Response Rate (tingkat pengembalian)	94,56%

Sumber: Data kuesioner penelitian

Analisis Karakteristik Responden

Dengan jumlah sampel akhir dalam penelitian ini sebanyak 169 responden adapun karakteristik responden sebagai berikut:

TABEL 4.2
Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	Prosentase (%)
Jenis Kelamin		
1. Laki-laki	101	59,8%
2. Perempuan	68	40,2%
Usia		
1. 25-30 thn	0	0%
2. 31-35 thn	15	8,9%
3. 36-40 thn	25	14,8%
4. 40-45 thn	95	56,2%
5. 45 thn keatas	34	20,1%
Pendidikan Terakhir		
1. D3	15	8,9%
2. D4	5	3,0%
3. S1	91	53,8%
4. S2	57	33,7%
5. S3	1	0,6%
Jabatan Kerja		
1. Ka. Bag	8	4,7%
2. Ka. Bid	18	10,7%
3. Ka. Si	78	46,2%
4. Ka. Sub Bag	33	19,5%
5. Ka. Sub Bid	12	7,1%
6. Bndahara	20	11,8%
Masa Kedudukan Jabatan		
1. ≤ 2 thn	18	10,7%
2. 3 thn	27	16,0%
3. > 3 thn	124	73,4%

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Analisis Statistik Deskriptif

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap variabel partisipasi penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan, budaya organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Satistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Mini	Maxi	Mean	Std. Deviation
PA_TOT	169	17	40	30,40	3,290
GK_TOT	169	16	45	36,63	5,434
BO_TOT	169	18	40	32,47	3,313
GG_TOT	169	19	45	38,67	3,943
KP_TOT	169	29	60	43,78	4,117
Valid N (listwise)	169				

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua kuesioner variabel independen dan variabel dependen pada penelitian ini dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua kuesioner variabel independen dan variabel dependen pada penelitian ini dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Semua tahap dalam uji asumsi klasik dinyatakan bahwa data berdistribusi normal serta data dinyatakan layak untuk dilakukan pengujian hipotesis karena tidak terjadi multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,841	3,360		2,929	,004
	PA_TOT	,215	,074	,176	2,911	,004
	GK_TOT	,294	,050	,389	5,934	,000
	BO_TOT	,045	,073	,036	,622	,535
	GG_TOT	,392	,061	,376	6,444	,000

a. Dependent Variable: KP_TOT

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KP = 9,841 + 0,215 PA + 0,294 GK + 0,045 BO + 0,392 GG + e$$

Pembahasan

1. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel partisipasi penyusunan anggaran (H_1) menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Kulon Progo, dengan nilai sig ($0,004$) $<$ $alpha$ $0,05$ dan bertanda positif, maka hasil pengujian untuk H_1 diterima yang berarti pernyataan responden terhadap keterlibatan penyusunan anggaran, pengaruh terhadap penetapan anggaran, dan pemberian pendapat menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diatas

menunjukkan bahwa penerapan partisipasi penyusunan anggaran di Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan dengan baik. Partisipasi penyusunan anggaran yang dilakukan di Kabupaten Kulon Progo sudah melibatkan aparat pemerintah untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran serta aparat pemerintah tersebut telah memahami cara menyusun anggaran yang benar.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran secara positif dan signifikan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yenti (2013). Tetapi konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Rohman (2012) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel gaya kepemimpinan (H_2) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Kulon Progo, dengan nilai sig ($0,000$) $<$ $alpha$ $0,05$ dan bertanda positif, maka hasil pengujian untuk H_2 diterima yang berarti pernyataan responden terhadap hubungan

atasan dan bawahan, suasana kekeluargaan, penghargaan atas gagasan/ide, kemampuan komunikasi pemimpin, hubungan antar anggota, pemberian arahan dalam bekerja dan fokus pada tujuan dan hasil menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik cara pemimpin dalam memimpin bawahannya bekerja, maka akan semakin baik pula kinerja bawahannya yang berdampak pada kenaikan kinerja pemerintah daerah tersebut. Pemimpin yang memiliki cara memimpin dengan baik dan disukai para bawahannya, maka bawahannya akan merasa senang, dan termotivasi dalam bekerja sehingga kinerjanya akan meningkat. Semakin cakap gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam mempengaruhi kinerja aparat pemerintah yang ada di bawahnya, maka akan semakin baik pula kinerja aparat pemerintah pada instansi tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan secara positif dan signifikan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Embrianto dkk. (2016) menyatakan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel budaya organisasi (H_3) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Kulon Progo, dengan nilai $sig (0,535) > alpha 0,05$ dan bertanda positif, maka hasil pengujian untuk H_3 ditolak yang berarti pernyataan responden terhadap proses pengambilan keputusan, dukungan dari pemimpin, adanya motivasi dalam bekerja, adanya tenggangrasa dalam organisasi menunjukkan pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dapat ditirukan dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa baik atau tidaknya budaya organisasi tidak akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah secara signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi bukan merupakan variabel yang secara signifikan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini disebabkan karena instansi pemerintah yang ada kurang menaati dan memahami nilai-nilai untuk berperilaku dalam organisasi dan menjalankan kewajibannya.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Hidayat dkk. (2014) menyatakan budaya organisasi berpengaruh positif

terhadap kinerja pegawai. Tetapi konsisten dengan penelitian yang dilakukan Aisyah dkk. (2014) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

4. Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel *good government governance* (H_4) menunjukkan bahwa *good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Kulon Progo, dengan nilai $sig (0,000) < \alpha 0,05$ dan bertanda positif, maka hasil pengujian untuk H_4 diterima yang berarti pernyataan responden terhadap pemahaman tugas dan fungsi jabatan yang dipegang, adanya sistem pengaduan masyarakat, kemudahan memperoleh informasi dan adanya perlakuan adil menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dari penelitian yang telah dilakukan hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang berorientasi pada kepentingan publik sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, pemahaman aparat pemerintah tentang *good governance* telah dilakukan secara benar sehingga memberikan dampak terhadap perilaku yang profesional dalam

bekerja di Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian apabila *good government governance* pada pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *good government governance* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Azlina dan Amelia (2014) menyatakan *good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

V. Pentup

Kesimpulan

1. Hasil penelitian yang dilakukan di 25 Stuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo menyatakan bahwa:
 - a. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
 - b. Gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
 - c. Budaya organisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
 - d. *Good government governance* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Berdasarkan Uji Regresi Linear Berganda yang diolah dengan program SPSS for Windows, didapat persamaan Regresi Linear Berganda sebagai berikut:

$$KP = 9,841 + 0,215 PA + 0,294 GK + 0,045 BO + 0,392 GG + e$$

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yang digunakan pada penelitian ini hanya partisipasi penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan *good government governance*. Diduga masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.
2. Penelitian ini menggunakan metode survey yang dilaksanakan dengan membagikan kuesioner tanpa dilengkapi wawancara atau uraian penjelasan yang disampaikan secara lisan sehingga jawaban yang diberikan responden kurang maksimal dan menimbulkan persepsi berbeda dari responden yang dapat menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda.
3. Peneliti melakukan penelitian pada SKPD Kabupaten Kulon Progo saja, sehingga

hasil yang diperoleh hanya mencerminkan kondisi yang ada di SKPD Kabupaten Kulon Progo.

4. Sampel pada penelitian ini adalah para manajer yang ada di SKPD Kabupaten Kulon Progo saja. Sehingga hasil yang diperoleh kurang dapat mewakili SKPD dilingkungan pemerintah lainnya. Peneliti membatasi daerah pengambilan sampel karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga.

Saran

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya adalah:

1. Bagi penelitian selanjutnya, memperluas obyek penelitian sehingga dapat meningkatkan kemampuan generalisasi kesimpulan hasil penelitian.
2. Bagi penelitian selanjutnya, menambah variabel independen lain yang belum atau masih jarang digunakan untuk penelitian yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah seperti disiplin, komitmen dan sarana prasarana.
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya ditambah dengan wawancara langsung kepada responden agar data yang diperoleh lebih tepat dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Karmizi, & Savitri, E., 2014, Pengaruh Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar), *JOM FEKON, Universitas Riau*, Vol.1 No. 2 Oktober 2014, hal: 1-16.
- Amelia, I., Desmiyawati, & Azlina, N., 2014, Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern, Dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, *JOM FEKON, Universitas Riau*, Vol. 1 No. 2 Oktober 2014, hal: 1-15.
- Arifin, S., & Rohman, A., 2012, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi, *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol. 1 No. 2, hal: 1-11.
- Azlina, N., & Amelia, I., 2014, Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol 12 No 2 Desember 2014, hal: 32-42.
- Bastian, I., 2001, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Daniri, M., 2005, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konsep Indonesia*, Jakarta: Ray Indonesia.
- Dewi, M. S., Dharmawan, N. A., & Werastuti, D. N., 2015, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah, *Journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2015.
- Donaldson, L., & Davis, J. H., 1991, Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Return, *Australian Journal of Management* Vol. 16 No 1 June 1991, p age 49-64.
- Embrianto, P. A., Sulindawati, N. G., & Sinarwati, N., 2016, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Gaya Kepemimpinan, Sistem Pengendalian Manajemen dan Total Quality Management terhadap Kinerja Karyawan dengan Locus Of Control sebagai Variabel Moderating, *Journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No. 3 Tahun 2016.
- Garrison, R., & Noreen, E., 2003, *Akuntansi Manajerial Edisi 1 Terjemahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I., 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Dengan Program IBM*

- SPSS 23, Cetakan V*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hansen, & Mowen., 2004, *Manajemen Biaya, Edisi Bahasa Indonesia, Buku Kedua*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, M., 2007, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hidayat, I., Kirmizi, & Safitri, D., 2014, Pengaruh Good Governance, Budaya Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pemerintah, *JOM FEKON, Universitas Riau*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014., hal: 1-14.
- Irianto, O., 2013, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, *Jurnal Ekonomi dan Sosial, Universitas Musamus Merauke*, Vol. 4 No. 1 April 2013, hal: 383-391.
- Jatmiko, B., & Lestiawan, H. Y., 2016, Good Governance Government Andthe Effect On Local Government Performance (Survey On Gunung Kidul District Government Of Indonesia), *IJABER*, Vol. 14 No. 14, page 981-997.
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyadi., 2001, *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*, Jakarta: Salemba Empat.
- Nazaruddin, I., & Basuki, A. T., 2017, *Analisis Statistik Dengan SPSS*, Yogyakarta: Danisa Media.
- Nazaruddin, I., & Setyawan, H.. 2012, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Motivasi, Desentralisasi dan Job Relevant Information sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal Akuntansi & Investasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 12 No. 2 Juli 2012, hal: 197-207.
- Podrung, N., 2011, The Strategic Role Of Managerial Stewardship Behaviour For Achieving Corporate Citizenship, *Ekonomski Pregled*, Vol. 62 No. 7-8, pp 404-420.
- Pratolo, S., & Jatmiko, B., 2017, *Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Raharjo, E., 2007, Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi, *Journal Fokus Ekonomi, STIE Pelita Nusantara Semarang*, Vol. 2 No. 1 Juni 2007, hal: 37-46.

- Ramadanil, R., 2013, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Tanah Datar), *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2013.
- Robbins, S., & Judge, T., 2017, *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior) Edisi Enam Belas*, Jakarta: Salemba Empat.
- TAP MPR RI No. XI/ MPR/ 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Wijana, B. R., & Supardo, S., 2006, *Kepemimpinan Dasar-dasar dan Pengembangannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yenti, D., 2013, Pengaruh Motivasi, Komitmen Organisasi Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Organisasi (Studi Empiris Pada SKPD Kota Padang), *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2013.
- <http://www.progonews.com> . (Pemda Kulon Progo Gagal Mencapai Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)). Diakses pada 28 Mei 2017, pukul 17.00 WIB